

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan laporan disabilitas yang diterbitkan oleh *World Health Organization* (WHO) dan *World Bank* pada tahun 2011, lima belas persen dari total penduduk dunia atau lebih dari satu milyar orang merupakan penyandang disabilitas. Mayoritas penyandang disabilitas tersebut berada di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Jumlah penyandang disabilitas di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan di negara-negara industri dan delapan puluh persen dari total penyandang disabilitas usia kerja dalam keadaan menganggur (Groce et al., 2011; ILO & OECD, 2018; Turk & Mitra, 2021).

Pembangunan berkelanjutan menghendaki tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pengurangan ketimpangan dan pembangunan yang inklusif. Hal tersebut juga tertuang dalam agenda 2030 *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan 8: “Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi” dan tujuan 10: “Berkurangnya kesenjangan”. Kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah melalui wirausaha. Wirausaha ikut serta dalam produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan inovasi baru dalam pasar (Arshed et al., 2021; Cumming et al., 2014; Kasseeah, 2016; Naudéer, n.d.; Neumann, 2021; Schumpeter, 1942; Śledzik, 2013). Seluruh negara berperan dalam mewujudkan “*The world better for everyone by the year 2030*”, dunia yang layak untuk semua di tahun 2030. Hal ini termasuk keikutsertaan penyandang disabilitas di dunia kerja layaknya manusia lainnya salah satunya adalah dengan mengambil bagian dalam berwirausaha (ILO, 2021).

Pelibatan penyandang disabilitas dalam dunia kerja sangat penting untuk mewujudkan hak-hak ketenagakerjaan, termasuk melalui pemberantasan diskriminasi dan penciptaan kesempatan yang setara. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan peran pihak ketiga, dalam hal ini organisasi internasional, nasional ataupun pemerintahan. Permasalahan mengenai disabilitas telah menjadi salah satu hal yang penting bagi dunia. Lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) dan *International Labor Organization* (ILO) turut mengambil bagian dalam mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas. ILO pada deklarasi satu abadnya menyoroti perlunya pendekatan yang berpusat pada manusia, yang secara eksplisit merujuk pada kebutuhan untuk memastikan kesempatan dan perlakuan yang setara bagi para penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaan lebih lanjut berbagai negara juga memiliki undang-undang atau peraturan terkait perlindungan hak-hak penyandang disabilitas (PBB, 2006).

Di negara-negara berkembang sebagian besar penyandang disabilitas bekerja pada kondisi yang lebih dirugikan. Secara global penyandang disabilitas menghadapi beragam kendala dalam mengakses dan mempertahankan pekerjaan. Belum lagi stigma yang disematkan oleh sebagian orang bahwa penyandang disabilitas tidak mampu bekerja dibanding dengan yang bukan penyandang disabilitas (Olney & Donoso, 2021). Penyandang disabilitas yang bekerja memiliki jam kerja yang tidak tetap, pendapatan yang lebih rendah, aturan kerja yang tidak adil, lebih sedikit peluang promosi (Hogan et al., 2012; Houtenville et al., 2021; Mani et al., 2018; Mitra et al., 2012; Norafandi & Diah, 2017). Kondisi-kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap tidak jauhnya disabilitas dari permasalahan kemiskinan (Brucker & Scally, 2015; Mitra et al., 2013).

Harapan mencapai kemandirian, keseimbangan kerja, peningkatan kebahagiaan dan kepuasan terhadap karir, pemanfaatan peluang atau kesempatan, peningkatan pendapatan dan perbaikan kualitas kehidupan membuat penyandang disabilitas memilih untuk berwirausaha (Halabisky, 2014). Penyandang disabilitas berwirausaha disebabkan oleh dua macam alasan utama yaitu pendorong dan penarik (Kitching, 2014). Alasan penarik berhubungan dengan kemandirian dan kemampuan untuk mengakomodasi kebutuhan hidup individu. Di Inggris, Jones & Latreille (2011) mengacu pada pilihan sukarela sebagai alasan utama bagi individu dalam memutuskan untuk berwirausaha. Alasan penarik lainnya berhubungan dengan fleksibilitas dalam jam kerja, lokasi kerja, akomodasi kebutuhan khusus di tempat kerja, dan kepuasan tersendiri yang muncul ketika seseorang bekerja sendiri (Gouskova, 2012; Meager & Higgins, 2011; Pagán-Rodríguez, 2012; Pagán, 2009). Kurangnya peluang untuk menjadi pekerja merupakan alasan pendorong seseorang untuk berwirausaha (Gottlieb et al., 2010; Gouskova, 2012; Pagán, 2009).

Capaian pendidikan penyandang disabilitas tahun 2020 di Indonesia dengan proporsi terbesar adalah tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sederajat, diikuti dengan pencapaian pendidikan tidak tamat SD yaitu pada proporsi 29,58 persen dan 27,74 persen. Proporsi terbanyak selanjutnya ialah pada tamatan SMA sederajat yaitu sebesar 14,31 persen. Sementara untuk pendidikan selevel dibawahnya, penyandang disabilitas yang menamatkan pendidikan SMP sederajat memiliki proporsi sebesar 10,35 persen. Untuk pendidikan tinggi, penyandang disabilitas yang menamatkan perguruan tinggi memiliki proporsi sebesar 5,12 persen (Bappenas, 2021).

Selain capaian pendidikan dapat pula diamati dari sisi penerapan teknologi khususnya internet. Meskipun dibanding non disabilitas masih lebih rendah, tren penggunaan internet pada penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 tingkat penggunaan internet penyandang disabilitas adalah 15,9 persen, 17,3 persen pada tahun 2019 dan 18,9 persen pada tahun 2020. Hal ini dapat menggambarkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia semakin melek teknologi atau melek internet. Meskipun tingkat penggunaan internet penyandang disabilitas masih jauh lebih rendah dibanding non-penyandang disabilitas yang pada tahun 2020 telah mencapai 52,7% (Bappenas, 2021).

Perkembangan teknologi, internet, dan perangkat digital dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi sebagian penyandang disabilitas. Seperti pada penyandang disabilitas yang menjadi lebih mudah mendapatkan pekerjaan atau mengerjakan pekerjaan dengan memanfaatkan penggunaan internet. Komputer dan teknologi juga dapat membantu penyandang disabilitas dalam melakukan pekerjaannya. (Olney & Donoso, 2021). Penggunaan teknologi khususnya penggunaan internet dapat mempengaruhi peluang untuk bekerja bagi penyandang disabilitas (Liu et al., 2022; Putri, 2019; Tan & Li, 2022).

Penelitian di India oleh Nafziger & Terrell (1975) menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang pendiri wirausaha, semakin pendek keberlangsungan usaha tersebut. Penelitian oleh Arshed et al. (2021) menemukan bahwa pendidikan yang rendah tidak mempengaruhi individu untuk menjadi

wirausahawan dalam jangka panjang. Pengetahuan dan keterampilan penting bagi seorang wirausahawan karena memberikan rasa kebebasan dan kemandirian serta keterampilan untuk mengelola usaha (Bowen & De Clercq, 2008; Jiménez et al., 2015; Reynolds et al., 1999; Verheul et al., 2001). Terajima (2006) mengemukakan bahwa, di Amerika Serikat pendidikan memberikan pengaruh pada kemampuan seseorang untuk memberdayakan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan penghasilan dalam berwirausaha. Sehingga untuk dapat meningkatkan kewirausahaan diperlukan investasi pada pendidikan yang lebih tinggi (Reynolds et al., 1999).

Fuentelsaz et al. (2015) juga menyatakan bahwa pengeluaran untuk pendidikan memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan peluang membangun wirausaha. Pendidikan akan berpengaruh terhadap terbentuknya pengetahuan, keterampilan, kreativitas dan inovasi pada diri seseorang (Chatterjee & Das, 2016; Malik, 2019; Okebukola, 2012). Pengetahuan, keterampilan, kreativitas dan inovasi memberikan dampak kepercayaan diri bagi pelaku usaha untuk menghasilkan ide nyata dalam meningkatkan keuntungan dan meminimalisir resiko kerugian. Selain itu pendidikan juga dapat membantu berkembangnya kemampuan komunikasi yang tentu juga sangat dibutuhkan dalam menyukseskan usaha yang dijalankan (Arshed et al., 2021). Penggunaan teknologi khususnya penggunaan internet dapat mempengaruhi peluang untuk bekerja bagi penyandang disabilitas (Liu et al., 2022; Putri, 2019; Tan & Li, 2022). Adanya kebijakan pemerintah atau regulasi tentang penyandang disabilitas juga berpengaruh terhadap peluang usaha penyandang disabilitas (Acemoglu & Angrist, 2001; Dewi et al., 2022).

Penelitian mengenai penyandang disabilitas dan ketenagakerjaan di Indonesia masih terbatas. Beberapa penelitian diantaranya adalah yang dilakukan oleh Halimatussadiah et al. (2018) dan Putri (2019). Pada penelitian tersebut menemukan bahwa peluang partisipasi penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja dan dipekerjakan lebih rendah dibandingkan dengan non disabilitas. Sementara penelitian oleh Usman & Kusumo Projo (2021) memperoleh temuan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki peluang yang sama untuk menjadi wirausaha. Mayoritas penyandang

disabilitas yang berwirausaha, dengan tingkat pendidikan yang rendah, tinggal di perdesaan dan usaha berskala kecil.

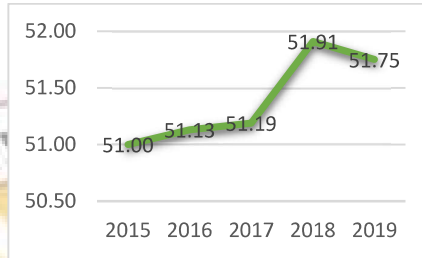
Penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada umumnya masih membahas tentang peluang bekerja penyandang disabilitas yang belum spesifik mengenai peluang penyandang disabilitas untuk berwirausaha. Sebagian penelitian membahas tentang pengaruh karakteristik modal manusia dan sosial demografi terhadap wirausaha, tetapi belum terfokus pada wirausaha penyandang disabilitas. Meskipun terdapat penelitian yang mencakup mengenai kondisi kewirausahaan penyandang disabilitas, tetapi belum melibatkan mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap peluang wirausaha penyandang disabilitas. Analisis mengenai penyandang disabilitas dan ketenagakerjaan, lebih spesifik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peluang wirausaha penyandang disabilitas penting dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada kelompok pengamatan keseluruhan sektor, sektor primer, sekunder dan tersier agar dapat lebih menyoroti keterlibatan penyandang disabilitas dalam setiap lini perekonomian. Hasil pengamatan dari setiap sektor bisa menjadi tambahan informasi dan bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat membantu untuk mewujudkan peluang bekerja yang lebih luas khususnya berwirausaha bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini diberi judul **“Analisis Peluang Wirausaha Penyandang Disabilitas di Indonesia”**

B. Perumusan Masalah

Wirausaha di Indonesia, menurut data yang diperoleh dari *worldbank*, sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, persentasenya mengalami peningkatan dari 51 persen di tahun 2015 menjadi 51,75 persen pada tahun 2019. Hal ini dapat menggambarkan bahwa semakin banyak penduduk Indonesia yang berwirausaha. Terciptanya lapangan kerja dari adanya wirausaha sangat berperan bagi kelompok rentan, salah satunya adalah penyandang disabilitas (Maritz & Laferriere, 2016; Thurik et al., 2008).

Penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 22,5 juta orang (Kemensos, 2020). Sementara itu jika dilihat berdasarkan tingkatan usia, berdasarkan laporan nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian

Kesehatan tahun 2018, proporsi penyandang disabilitas di Indonesia adalah 22 persen penyandang disabilitas usia dewasa, 3,8 persen penyandang disabilitas lansia dan 3,3 persen penyandang disabilitas anak-anak.



Sumber: (<https://data.worldbank.org>)

Gambar 1. Persentase Wirausaha di Indonesia 2015-2019

Untuk memenuhi segala hak penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016). Salah satu hak penyandang disabilitas yang dimuat dalam undang-undang ini adalah mengenai pekerjaan yang salah satu bentuknya adalah hak penyandang disabilitas dalam berwirausaha. Dalam pelaksanaannya UU 8/2016 dijabarkan lebih lanjut menjadi Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) hingga Peraturan Daerah (Perda). Salah satu Peraturan Pemerintah yang merupakan lanjutan dari UU 8/2016 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi terhadap penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.



Sumber: (Bappenas, 2021)

Gambar 2. Persentase Penyandang Disabilitas dan non-Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Indonesia 2018 - 2020

Penyandang disabilitas di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam hal pekerjaan. Terlihat dari proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di Indonesia dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 terdapat

58 persen penyandang disabilitas yang bekerja. Sementara pada tahun 2019 dan 2020 berjumlah 56,7 persen dan 55,5 persen (Bappenas, 2021). Proporsi tersebut juga masih lebih kecil dibandingkan dengan non-penyandang disabilitas. Masuk ke dunia usaha atau memutuskan untuk berwirausaha merupakan alternatif pilihan yang dapat diambil oleh penyandang disabilitas agar tetap dapat bekerja (Norafandi & Diah, 2017; Usman & Kusumo Projo, 2021).

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan yang mewakili rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran wirausaha penyandang disabilitas di Indonesia pada keseluruhan sektor, sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi peluang penyandang disabilitas untuk berwirausaha di Indonesia pada keseluruhan sektor, sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis gambaran wirausaha penyandang disabilitas di Indonesia pada keseluruhan sektor, sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peluang penyandang disabilitas untuk berwirausaha di Indonesia pada keseluruhan sektor, sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

Dari sisi metodologi, penelitian diharapkan dapat melengkapi hasil dari penelitian-penelitian terdahulu sehingga dapat juga menjadi acuan dalam penelitian-penelitian belakangan dalam topik yang sama.

Dari sisi kebijakan, diharapkan dapat menjadi tambahan informasi yang dapat digunakan untuk menyempurnakan kebijakan terkait peningkatan kapabilitas atau kapasitas penyandang disabilitas agar semakin berpeluang terlibat dalam dunia kerja khususnya berwirausaha.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menerapkan beberapa pengertian istilah, batasan dan ruang lingkup dengan maksud agar penelitian ini dapat terfokus pada pembahasan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan penelitian. Objek dari penelitian ini adalah penyandang disabilitas yang bekerja. Sampel penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari survei Sakernas Agustus 2020. Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan pada keseluruhan sektor, kelompok sektor primer, sekunder dan tersier. Kelompok sektor primer terdiri dari lapangan usaha kategori: (A) pertanian, kehutanan dan perikanan; (B) pertambangan dan penggalian. Kelompok sektor sekunder terdiri atas lapangan usaha kategori: (C) industri pengolahan; (D) pengadaan listrik dan gas; (E) pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang; (F) konstruksi; (G) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (H) transportasi dan pergudangan; (I) penyediaan akomodasi dan makan minum; dan (J) informasi dan komunikasi. Sementara kelompok sektor tersier terdiri dari: (K) jasa keuangan dan asuransi; (L) Real Estate; (MN) jasa perusahaan; (O) administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; (P) jasa pendidikan; (Q) jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan (RSTU) jasa-jasa lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini akan disajikan dalam lima bab. Bab I merupakan pendahuluan, yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan. Bab II berisi tinjauan literatur yang merupakan landasan teori yang digunakan sebagai dasar berpikir, penyajian temuan-temuan pada hasil penelitian terdahulu sebagai pendukung dalam penelitian, kerangka pikir penelitian dan hipotesis penelitian. Pada bab III disajikan Metodologi penelitian yang mencakup penjelasan mengenai data dan sumber data, metode analisis yang digunakan dan definisi operasional variabel. Bab IV merupakan pembahasan hasil penelitian yang mencakup analisis deskriptif, analisis inferensial dan implikasi kebijakan terkait dengan hasil penelitian. Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.